

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada studi kasus tingkat kemiskinan di 221 kota/kabupaten di Indonesia tahun 2020, algoritma CLARANS terbukti efektif dan efisien dalam melakukan analisis kluster pada dataset besar. Hal ini terlihat dari kualitas hasil klusterisasi yang cukup baik berdasarkan kriteria *silhouette coefficient* yang menunjukkan bahwa struktur yang dihasilkan sudah baik. Jumlah kluster yang terbentuk pada studi kasus ini yaitu 4 kluster, dimana setiap kluster memiliki jumlah anggota dan pusat kluster (*medoid*) yang berbeda - beda. Kluster 1 merupakan kluster dengan jumlah anggota paling sedikit dan semuanya berupa objek kota/kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan kluster 4 merupakan kluster dengan jumlah anggota terbanyak dimana Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kluster ini.
2. Karakteristik yang terbentuk dari masing – masing kluster yaitu kluster 1 merupakan kluster dengan tingkat kemiskinan tertinggi karena memiliki rata – rata persentase penduduk miskin paling besar dibandingkan kluster lainnya yaitu 27,70%.. Kluster 2 merupakan kluster dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi yang memiliki rata – rata persentase penduduk miskin sebesar 17,02 %. Kluster 3 merupakan kluster dengan tingkat kemiskinan sedang yang memiliki rata – rata persentase penduduk miskin sebesar 10,86 %. Kemudian yang

terakhir klaster 4 merupakan klaster dengan tingkat kemiskinan rendah yang memiliki rata – rata persentase penduduk miskin sebesar 5,57 %.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta keterbatasan - keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini, terdapat beberapa saran yang hendak peneliti sampaikan:

1. *Coding* CLARANS pada program R yang telah dibuat oleh peneliti masih belum sempurna pada bagian pemilihan secara acak *node* tetangga dari suatu *node* terpilih, oleh karena itu masih memerlukan penyempurnaan pada bagian *coding* tersebut.
2. Kepada pemerintah pusat hendaknya lebih memprioritaskan penanganan kemiskinan di kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebab sebagian besar kota/kabupaten di provinsi tersebut memiliki tingkat kemiskinan paling parah jika dibandingkan dengan kota/kabupaten di provinsi lainnya sehingga memerlukan perhatian lebih.